



PERUBAHAN RENCANA KERJA

2025

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN
PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	√			
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	√			
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung,



YUSNADI FERianto. SE., MM
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19750212 199703 1 003

Diverifikasi : Tanggal		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, S.T., M.Si.	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	FITRI YANTI, S.T., M.Si.	
	Fungsional Perencanaan Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19700218 199303 2 002

**FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan.	√			
4.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran walikota.	√			
5.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah	√			
6.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.		√	Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
Bandar Lampung,


YUSNADI FERianto, SE., MM
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19750212 199703 1 003

Diverifikasi : Tanggal		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, S.T., M.Si. Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	FITRI YANTI, S.T., M.Si. Fungsional Perencanaan Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung


DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19700218 199303 2 002

**FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP
KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi RenjaPerangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Diverifikasi : Tanggal		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, S.T., M.Si.	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	FITRI YANTI, S.T., M.Si.	
	Fungsional Perencanaan Bapperida Kota Bandar Lampung	

Bandar Lampung, 2025
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung


DINI PURNAMA WATY, S.E.M.Si.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19700218 199303 2 00

KATA PENGANTAR

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Tiap-tiap tahunnya OPD mempersiapkan penyusunan rencana kerja yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 ini merupakan dasar acuan yang akan menjadi pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Akhirnya kami harapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun-tahun yang akan datang.

PARAF KOORDINASI		
1	Sekretaris	
2	Kabid	
3	Kasubag	
4	Kasi	

Bandar Lampung, 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG


YUSNADI FERianto, SE., MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19750212 199703 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-10
1.4. Sistematika Penulisan	I-11
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	II-1
2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan/ Tahun 2025	II-1
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
BAB IV PENUTUP	IV-1

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025
NOMOR :**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah di tahap terakhir dari RPJPD Kota Bandar Lampung. RPJMD tersebut memuat perkiraan maju rencana pengeluaran selama 5 tahun sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tiap tahunnya dengan memperhatikan kondisi perekonomian, isu-isu strategis, asumsi ekonomi dan estimasi penerimaan/pengeluaran Kota Bandar Lampung yang dalam perjalannya dapat terjadi perubahan-perubahan. Oleh karenanya untuk memastikan tercapainya target rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang jika diperlukan dilakukan perubahan terhadap RKPD tahun berjalan yang disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam perjalanan pelaksanaan rencana pembangunan tahunan tersebut.

Desain perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2025 yang disusun pada tahun 2024 dan telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025, saat ini dalam pelaksanaannya harus mengalami penyesuaian atau perubahan mengingat pada tahun berjalan menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah. Selain itu, perubahan RKPD Tahun 2025 juga memperhatikan hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2025 serta asumsi dan

kondisi terkini sehingga rencana pembangunan Kota Bandar Lampung pada beberapa sektor mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan proses kerja. Namun demikian terdapat beberapa hal yang tetap menjadi perhatian seperti tantangan global dan dukungan terhadap pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi misi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan sinergi yang erat dari semua pihak dan pelaku kepentingan baik pemerintah, swasta, pelaku usaha serta seluruh masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan perubahan RKPD tahun 2025 sebagai dasar dalam penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun 2025. Secara garis besar, perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 didasarkan pada :

1. Perubahan proyeksi dan alokasi belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik seiring dengan perubahan proyeksi pendapatan daerah.
2. Penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024.
3. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan atas evaluasi APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.

Selain itu perubahan RKPD tahun 2025 dilakukan dalam rangka menyesuaikan perencanaan pembangunan dengan kondisi ekonomi terkini (realitas ekonomi). Kondisi tersebut tentunya perlu direspon secara tepat dengan mengoptimalkan peluang yang ada guna memastikan relevansi pada sasaran ekonomi makro yang ditetapkan.

Perubahan RKPD tahun 2025 disusun dengan tahapan (a) Penyusunan rancangan perubahan RKPD; (b) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (c) penetapan perubahan RKPD. Adapun Perubahan RKPD 2025 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan. Perumusan rancangan Perubahan RKPD mencakup analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi triwulan II tahun berjalan, penelaahan terhadap kebijakan, perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah beserta perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif. Pada perumusan rancangan perubahan RKPD, DPRD dapat memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada Kepala Daerah melalui aplikasi e-planning ataupun secara tertulis dalam rapat dengar pendapat. Bila rancangan perubahan RKPD telah disetujui oleh Kepala Daerah, ditindak lanjuti dengan membuat surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan rancangan peraturan kepala daerah tentang perubahan RKPD setelah difasilitasi oleh Gubernur selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD 2025 sekaligus juga sebagai dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah, dan pedoman penyusunan KUA Perubahan APBD serta Perubahan PPAS.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
13. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173)

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006)

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
34. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
35. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
36. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
37. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

38. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang APBD tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);
41. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 20);
42. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 47).
43. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 24 Tahun 2023, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

- a. Sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025;
- b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
- c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

- II.1 Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan/tahun 2025
Formulir E.81

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- III.1 Tabel Rincian Perubahan program, kegiatan, sub kegiatan, Target dan pagu pada perubahan Rencana kerja perangkat daerah Tahun 2025

Bab IV. Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan/Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung merupakan perubahan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan capaian kinerja. Pada tahun anggaran 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, yang dijabarkan dalam **8 (Delapan) Program, 17 (Tujuh Belas) Kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan**.

Realisasi Anggaran per tanggal 1 januari 2025 sampai dengan 30 Maret 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 13.794.007.893,- dari pagu yang tersedia dalam DPA 2025 sebesar Rp. 77.354.191.155,- atau sebesar 17,83%.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp. 60.661.930.681,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.559.882.893,- atau 22.35% yang dijabarkan dalam beberapa subkegiatan berupa:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 29.993.937,- dan belum terealisasi.
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 29.999.920,- dan belum terealisasi.
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 20.254.191.155,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.916.701.893,- atau sebesar 29.21% tersedianya gaji dan tunjangan ASN.
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 258.756.975,- dan belum terealisasi.
5. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan belum terealisasi.
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 19.999.439,- dan belum terealisasi.
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 179.999.121,- dan belum terealisasi.
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 59.999.310,- dan belum terealisasi.
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 143.000.000,- dan belum terealisasi.
10. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 159.840.545,- dan terealisasi sebesar Rp. 40.353.000,- atau sebesar 25,25% tersedianya barang cetak dan pengadaan.
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 84.000.000,- dan belum terealisasi.
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 100.002.439,- dan belum terealisasi.

13. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp235.000.000,- dan belum terealisasi.
14. Pengadaan Meubel dengan anggaran sebesar Rp.166.751.870,- dan belum terealisasi.
15. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan belum terealisasi.
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 128.200.000,- dan belum terealisasi.
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 25.200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.842.000.000 atau sebesar 23,18% tersedianya pelayanan administrasi perkantoran.
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 38.670.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.408.000,- atau sebesar 29,50% terlaksananya pemeliharaan kendaraan mobil dan jabatan.
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 12.117.330.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.664.618.000,- atau sebesar 13,74% tersedianya kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional.
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 981.195.970,- dan terealisasi sebesar Rp.84.802.000,- atau sebesar 8,64% tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp. 401.067.120,- dan dijabarkan dalam dua kegiatan berupa:

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/kota didukung anggaran sebesar Rp.400.000.000,- dan dijabarkan dalam satu sub kegiatan berupa:

- 1.1. Penyusunan RPPLH Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp.400.000.000,- dan belum terealisasi.

2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/kota didukung anggaran sebesar Rp.1.067.120,- dan dijabarkan dalam satu sub kegiatan berupa:

- 2.1. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 1.067.120,- dan belum terealisasi.

3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup didukung anggaran sebesar Rp. 575.000.000,- dan dijabarkan dalam tiga kegiatan berupa:

1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota didukung anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan dijabarkan dalam dua sub kegiatan berupa:

- 1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan belum terealisasi.

- 1.2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan belum terealisasi.

2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan dijabarkan dalam satu sub kegiatan berupa:

- 2.1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan belum terealisasi.

3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan dijabarkan dalam satu sub kegiatan berupa:

- 3.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan belum terealisasi.

4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) ada satu kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati didukung anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan dijabarkan dalam satu kegiatan berupa:

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/kota didukung anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan dijabarkan dalam satu sub kegiatan berupa:

- 1.1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 234.125.000,- atau 58,53% tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang dikelola.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ada satu kegiatan didukung anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- dan dijabarkan dalam satu kegiatan berupa:

1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kab/kota didukung anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- dan dijabarkan dalam satu sub kegiatan berupa:
 - 1.1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan belum realisasi.
 - 1.2. Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan belum realisasi.

6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat ada satu kegiatan didukung anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan dijabarkan dalam satu kegiatan berupa:

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/kota didukung anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan dijabarkan dalam satu sub kegiatan berupa:
 - 1.1. Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat /dunia usaha /dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan belum realisasi.

7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup ada satu kegiatan didukung anggaran sebesar Rp. 99.999.936,- dan dijabarkan dalam satu kegiatan berupa:

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) didukung anggaran sebesar Rp. 99.999.936,- dan dijabarkan dalam satu sub kegiatan berupa:
 - 1.1. Pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kab/kota dengan anggaran sebesar Rp. 99.999.936,- dan belum realisasi.

8) Program Pengelolaan Sampah

Program Pengelolaan Sampah ada satu kegiatan pengelolaan sampah didukung anggaran sebesar Rp. 14.891.193.418,- dan dijabarkan dalam satu kegiatan berupa:

1. Pengelolaan Sampah didukung anggaran sebesar Rp.14.891.193.418,- dan dijabarkan dalam tiga sub kegiatan berupa:
 - 1.1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- dan belum terealisasi.
 - 1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan anggaran sebesar Rp. 14.511.193.418,- dan belum terealisasi.
 - 1.3. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/kota atau TPA/TPST regional dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan belum realisasi.

[illegible]

2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	RPPLH dalam rencana Pengembangan Kab/Kota	dokumen	1		0		1						0,00		0		0,00		0,00		0,00							
						KLHS untuk K/R/P Kab/Kota	dokumen	4		3		1							0,00		0		3,00		75,00								
2	11	02	2.01		Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	RPPLH Kota Bender Lampung	dokumen	6	200.000.000,00	0	158.182.000,00	1	400.000.000,00		-			0,00	-	0	-	0,00	158.182.000,00	0,00	79,09								
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pencemaran RPPLH Kab/Kota	Jumlah Dokumen Tetapan Kebijakan yang Telah Mengkomodir RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen	5	860.982.563,00	0								0,00	-	0	-	0,00	-	0,00	-								
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kab/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kab/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kab/kota dan Mengkomodir arahan RPPLH Provinsi	dokumen	1	200.000.000,00	100	158.182.000,00	1.000	400.000.000,00					0,00	-			1,00	158.182.000,00	-	79,09								
2	11	02	2.02		Pengembangan Kajian Strategis Hidup strateqis (KLHS) kab/kota	KLHS Kota Bender Lampung	dokumen	5	400.000.000,00	3	840.987.556,00	2	1.067.120,00		-			0,00	-	0	0,00	3,00	840.987.556,00	60,00	212,50								
2	11	02	2.02	0002	Pemantauan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPMD Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	4	400.000.000,00	2	525.798.800,00	1.000	-					0,00	-	1	#DIV/0!	3,00	525.798.800,00	75,00	131,30								
2	11	02	2.02	0005	Penyenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	dokumen	1		1	324.786.696,00	1.000	1.067.120,00		-			0,00	-	0	0,00	2,00	324.786.696,00	200,00	-								
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	58,60	2.670.765.125,00	50,00	126.400.000,00	58,60	575.000.000,00					0,00	-	0	50,00	126.400.000,00	85,32	4,82									
						Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	81,50		82,54		81,40					0,00	-	0	82,54		101,28											
						Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	35,82		35,60		34,13					0,00	-	0	35,60		78,39											
						Pencemaran Emisi Gas Rumah Kaca	%	9,00		0,00		8,00					0,00	-	0	0,00		0,00											
						DDOTLK Kota Bender Lampung, Pembekalan Kampung BSM dan Serana dan Prasana Laboratorium	paket	6	1.420.765.125,00	1	15.280.000,00	1	250.000.000,00		-				0,00	-	0	0	1,00	15.280.000,00	16,67	1,08							
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	Jumlah Dokumen Uj Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	1	100.000.000,00	1	15.280.000,00							0,00	-			1,00	15.280.000,00	100,00	15,28								
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi,Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Investigasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	5	745.765.125,00	0,00		1.000	100.000.000,00					0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-								
2	11	03	2.01	0015	Pengelolan laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan di Laboratorium lingkungan	dokumen	5	575.000.000,00	0		1	150.000.000,00					0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-								
2	11	03	2.02		Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	DNPLHD Kota Bender Lampung	dokumen	5	650.000.000,00	1	113.400.000,00	1	75.000.000,00		-			0,00	-		-	1,00	113.400.000,00	20,00	17,45								
2	11	03	2.02	0001	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	laporan	5	650.000.000,00	1	113.400.000,00	1	75.000.000,00					0,00	-	0,00	-	1,00	113.400.000,00	20,00	17,45								
2	11	03	2.03		Pemutihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara	lokasi	6	600.000.000,00	0	-	1	250.000.000,00	0,44	-			0,44	-	44	-	0,44	-	7,33	-								

2	11	03	203	0008	Koordinasi dan sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kab/kota yang dilaksanakan	kegiatan	2	100,000,000.00		100		-					0.00	-	0	#DIV/0!	0.00	-	0.00	-	
2	11	03	203	0013	Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kab/kota yang dilaksanakan	kegiatan	4	500,000,000.00		100	250,000,000.00	0.04					0.04	-	40	-	0.04	-	11.00	-	
2	11	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANAEKARAGAMAN HAYATI (KEHAT)	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	dokumen	1	2,810,860,766.00	1	1,405,938,850.00	-	400,000,000.00	-	234,125,000.00			0.00	234,125,000.00	-	58.53	1	1,631,053,850.00	100.00	58.17		
					Master Plan Ruang Terbuka Hijau	dokumen	1		0	-	0			0.00		-	0		0.00							
					Peningkatan Pemertuaan Ruang Terbuka Hijau	%	4.90		4.60	4.60	0			0.00		0		4.60	93.88							
2	11	04	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH	paket	5	2,810,860,766.00	1	1,405,938,850.00	1	400,000,000.00		234,125,000.00			0.00	234,125,000.00	0.00	58.53	1.00	1,631,053,850.00	0.20	58.17		
2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1	250,000,000.00	1	99,394,000.00							0.00	-		1.00	99,394,000.00	100.00	39.76		
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang dikaita Lingkup Keanekaragaman Kabupaten/Kota	ha	23278021	1,718,625,000.00	1318.86	1,301,534,800.00	439.60	400,000,000.00		234,125,000.00			0.00	234,125,000.00	0.00	58.53	439.60	1,535,659,850.00	439.60	89.35	
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Pagarana Keanekaragaman Hayati yang Diakut	jumlah Sarana dan Pagarana Keanekaragaman Hayati yang Diakut	unit	4	842,235,766.00	0.00								0.00	-		0.00	-	0.00	-		
2	11	06		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan yang Diawasi Ketatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PPLH LH yang Ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	64	748,210,409.00	62	39,455,928.00	63	275,000,000.00	-					0.00	-	0	-	62.00	39,455,928.00	96.88	5.27	
					Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan yang Izn Lingkungan dan Izn PPLH ditetbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	%	64	748,210,409.00	62	39,455,928.00	63	275,000,000.00	-				0.00	-	0	-	62.00	39,455,928.00	96.88	5.27		
2	11	06	2.01	0001	Facilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izn Lingkungan dan/atau Izn PPLH	jumlah Rekomendasi dan/atau Penetapan Teknis, Penetapan Lingkungan, dan Surat Kelengkapan Operasi yang Dibenarkan	Dokumen	1	-			100	75,000,000.00						0.00	-	0.00	-	-	-		
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Penetapan Lingkungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	badan usaha	90	748,210,409.00	90	39,455,928.00	90	200,000,000.00	17	-			11.00	-	12.22	-	13.12	18,727,964.00	14.58	264	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Produtkat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	sekolah	15 sekolah	500,000,000.00	0	-	3	50,000,000.00	-				0.00	-	0	-	0.00	-	-	-	
2	11	09	2.01		Pembinaan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Produtkat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	sekolah	15 sekolah	500,000,000.00	0	-	3	50,000,000.00	-				0.00	-	0	-	0.00	-	-	-	
2	11	09	2.01	0001	Perilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Pertanngin dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Pertanngin yang dinilai kinerjanya dalam terlegh PPLH	entitas	15	500,000,000.00			10.00	50,000,000.00	-				0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	

2	11	10				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait Isin Lingkungan, Isin PPLH dan PUU LH yang Diurungkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	%	500	476,133,897.00	100	6,166,000.00	100	99,999,936.00		-					0.00	-	0	-	100.00	6,166,000.00	20.00	1.30		
2	11	10	2.01			Penyediaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH	%	500	476,133,897.00	100	6,166,000.00	100	99,999,936.00	30	-					30.00	-	30	-	130.00	6,166,000.00	26.00	1.30		
2	11	10	2.01	0004		Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	pengaduan	5	476,133,897.00	100	6,166,000.00	100	99,999,936.00	300	-				300	-	300.00	-	1300.00	6,166,000.00	420.00	1.30			
2	11	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Tindakan Sampah yang Ditangani	%	80.00	11,733,126,153.00	92.82	10,424,386,400.00	82.00	14,891,193,418.00	-	-				-	0.0000	-	0.00	-	92.82	10,424,386,400.00	116.03	88.85		
2	11	11					Presentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui IS	%	20.00		4.72		18.00		-							0.00	-	4.72		23.60				
2	11	11					Presentase Cakupan Area Pelayanan	%	100.00		100		100		-					0.00	-	0.00	-	100.00		100.00				
2	11	11					Presentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	100.00		97.54		100		-					0.00	-	0.00	-	97.54		97.54				
2	11	11	2.01			Pengelolaan Sampah	Peningkatan Penanganan Pengabdian Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung	%	100.00	11,733,126,153.00	100	10,424,386,400.00	100	14,891,193,418.00	25	-				25.00	-	25.00	-	125.00	10,424,386,400.00		88.85			
2	11	11	2.01	0004		Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat, kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kelompok	35	2,047,709,250.00	21	790,156,600.00	7	280,000,000.00		-				0.00	-	0.00	-	21.00	790,156,600.00	60.00	38.61			

[illegible]

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2025 ini rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung mengalami perubahan anggaran dari sebelumnya secara keseluruhan pada rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 8 (delapan) Program, 17 (Tujuh belas) Kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.
- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1.3.1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang.
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
 - 1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 1.4.5. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan.
 - 1.4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

- 1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 1.5.2. Pengadaan Meubel.
 - 1.5.3. Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya.
- 1.6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.61. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 1.62. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.71. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 1.72. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 1.73. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

- 2.1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota.
 - 2.1.1. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.
- 2.2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kab/kota.
 - 2.2.1. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

- 3.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
 - 3.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
 - 3.1.2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- 3.2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
 - 3.2.1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.
- 3.3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
 - 3.3.1. Koordinasi, Sinkronisasi Rehabilitasi.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).

- 4.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.
 - 4.1.1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

- 5.1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 5.1.1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

- 5.1.2. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota dan Peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

- 6.1. Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/kota.
 - 6.1.1. Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat /dunia usaha /dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

- 7.1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.
 - 7.1.1. Pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tingkat kab/kota.

8. Program Pengelolaan Persampahan.

- 8.1. Pengelolaan Sampah
 - 8.1.1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.
 - 8.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan.
 - 8.1.3. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/kota atau TPA/TPST regional.

Dengan diterbitkannya peraturan baru yaitu Peraturan Walikota Bandar Lampung No 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan baru, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung juga mengalami perubahan. Format Perubahan untuk Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang telah disesuaikan dengan peraturan Walikota Bandar Lampung No 34 Tahun 2025 tertuang dalam Tabel 3.1.

TABEL 3.1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KET
Urusan	Bidang Urusan	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABA RAN APBD TAHUN 2025	PERUBA HAN RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	11				LINGKUNGAN HIDUP									61,355,099,455.00	77,354,191,155.00	82,512,925,279.00	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP									61,355,099,455.00	77,354,191,155.00	82,512,925,279.00	
2	11	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Persen	Persen	98	98	98	57,634,695,942.50	60,886,738,745.00	61,701,597,494.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	Persen	90	90	90	225,000,000.00	59,993,857.00	28,535,422.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	2	2	3	150,000,000.00	29,993,937.00	18,615,502.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3	2	2	75,000,000.00	29,999,920.00	9,919,920.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	Persen	90	90	90	17,259,369,557.00	20,512,948,130.00	20,512,948,130.00	Dinas Lingkung an Hidup

2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bula n	Orang/ Bula n	246	246/14	246/14	17,014,169,557.00	00 20,254,191,155.	20,254,191,155.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	220,200,000.00	0 258,756,975.0	258,756,975.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Dokumen	Dokumen	1	0	0	25,000,000.00	0	0	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persen		90			100,000,000.00	75,000,000.00	50,000,000.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang	5	5	5	100,000,000.00	75,000,000.00	50,000,000.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	tahun	tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	610,510,000.00	0 746,840,854.0	771,840,854.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penarangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penarangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20,010,000.00	00 19,999,439.	19,999,439.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	100,000,000.00	0 179,999,121.0	179,999,121.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	50,000,000.00	00 59,999,310.	59,999,310.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	212,500,000.00	143,000,000.00	143,000,000.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tahun	Tahun	1	1	1	110,000,000.00	0 159,840,545.0	159,840,545.00	Dinas Lingkung an Hidup

2	11	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	12	1	1	18,000,000.00	00 84,000,000.	84,000,000.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	100,000,000.00	100,002,439.00	125,002,439.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	paket	paket	paket	paket	paket	4,551,846,814.00	801,751,870.00	801,751,870.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	5	1	1	4,120,000,000.00	0 235,000,000.0	235,000,000.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	7	5	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	201,846,814.00	0 166,751,870.0	166,751,870.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	7	6	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	230,000,000.00	0 400,000,000.0	400,000,000.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	tahun	tahun	tahun	tahun	tahun	22,752,100,000.00	25,328,200,000.00	25,448,200,000.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunika, Sumber Daya Air Dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunika, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		384,100,000.00	128,200,000.00	128,200,000.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		22,368,000,000.00	00 25,200,000,000.	25,320,000,000.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Inventaris Kantor yang Terpelihara	tahun	tahun	tahun	tahun	tahun	12,135,869,571.50	00 13,362,004,034.	14,088,321,218.00	Dinas Lingkung an Hidup
2	11	1	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1			48,400,000.00	38,670,000.00	38,670,000.00	Dinas Lingkung an Hidup

2	11	1	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	211	211	211	11,190,185,771.50	12,242,138,064.00	13,111,779,834.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	9	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	155	155	155	897,283,800.00	1,081,195,970.00	937,871,384.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH Kabupaten/Kota	RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen				743,101,250.00	401,067,120.00	344,967,120.00	Dinas Lingkungan Hidup
							RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	Dokumen	Dokumen	Ada	Ada	Ada				
							KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota	KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota	Dokumen	Dokumen	Ada	Ada	Ada				
2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	RPPLH Kota Bandar Lampung	RPPLH Kota Bandar Lampung	Dokumen	Dokumen	Ada	Ada	Ada	243,101,250.00	400,000,000.00	343,900,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	2.01	6	Penyusunan RPPLH Kab/Kota	Penyusunan RPPLH Kab/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kab/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kab/kota dan Mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen RPPLH Kab/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kab/kota dan Mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	dokumen		0	1	1	243,101,250.00	400,000,000.00	343,900,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	2.02		Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota	Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota	KLHS Kota Bandar Lampung	KLHS Kota Bandar Lampung	dokumen	dokumen	1	1	1	500,000,000.00	1,067,120.00	1,067,120.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	2.02	5	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	dokumen	dokumen	2	1	1	500,000,000.00	1,067,120.00	1,067,120.00	Dinas Lingkungan Hidup

2	11	3			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil pengukuran Indeks Kualitas air	Hasil pengukuran Indeks Kualitas air	indeks	indeks	58,60	58,60	58,60	646,202,500.00	499,600,000.00	433,510,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
							Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	indeks	indeks	81,40	81,40	81,40				
							Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	indeks	34,13	34,13	34,13				
							Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	Persen	8	8	8				
2	11	3	2.01		Pencegahan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium	DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium	paket	paket	paket	paket	paket	396,202,500.00	0 250,000,000.0	194,010,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	dokumen	1	0	0	146,202,500.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	- 0	100,000,000.0	54,900,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.01	15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	Dokumen	1	1		250,000,000.00	0 150,000,000.0	139,110,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.02		Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	DIKPLHD Kota Bandar Lampung	DIKPLHD Kota Bandar Lampung	Dokumen	Dokumen	1			100,000,000.00	75,000,000.00	64,900,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.02	1	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	Laporan	1			100,000,000.00	75,000,000.00	64,900,000.00	Dinas Lingkungan Hidup

2	11	3	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara	Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara	lokasi	lokasi	lokasi			150,000,000.00	174,600,000.00	174,600,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.03	13		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	Kegiatan	1			150,000,000.00	174,600,000.00	174,600,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen	Dokumen				598,102,812.50	400,000,000.00	400,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
							Master Plan Ruang Terbuka Hijau	Master Plan Ruang Terbuka Hijau	Dokumen	Dokumen							
							Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	Persen	4,70	4,70	4,70				
2	11	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH	Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH	paket	paket	paket	1	1	598,102,812.50	400,000,000.00	400,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/kota	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/kota	Ha	Ha	469.58	439.6	439.6	598,102,812.50	400,000,000.00	400,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persen		63			0.00	229,900,000.00	123,857,672.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan	Persen	Persen	63	63	63	0.00	229,900,000.00	123,857,672.00	Dinas Lingkungan Hidup

2	11	6	2.01	1		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Izin Lingkungan yang diterbitkan		Laporan	1				75,000,000.00	47,682,672.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	2.01	9	Pengawasan PerizinanBerusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yangditerbitkanolehPemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawasan PerizinanBerusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yangditerbitkanolehPemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan	Badan	90	90	90		154,900,000.00	76,175,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
									Usaha	Usaha							
2	11	9			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	sekolah	sekolah	3	3	3	100,000,000.00	359,936.00	359,936.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	sekolah	sekolah	3	3	3	100,000,000.00	359,936.00	359,936.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	sekolah	Entitas	3	3	3	100,000,000.00	359,936.00	359,936.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota		Persen		100			50,000,000.00	45,331,936.00	45,331,936.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH	Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH	Persen		100			50,000,000.00	45,331,936.00	45,331,936.00	Dinas Lingkungan Hidup

2	11	10	2.01	4	Pengelolaan Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota (Pengelolaan Pengaduan)	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangan	Dokumen	Pengaduan	1	1	1	50,000,000.00	45,331,936.00	45,331,936.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah yang Ditangani	Timbulan Sampah yang Ditangani	Persen	Persen	82	82	82	1,582,996,950.00	14,891,193,418.00	19,463,301,121.00	Dinas Lingkungan Hidup
							Persentase Jumlah Sampah yang Berkurangnya melalui 3R	Persentase Jumlah Sampah yang Berkurangnya melalui 3R	Persen	Persen	18	18	18				
							Persentase Cakupan Area Pelayanan	Persentase Cakupan Area Pelayanan	Persen	Persen	100	100	100				
							Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persen	Persen	100	100	100				
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung	Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung	Persen	Persen	100,00	100,00	100,00	1,582,996,950.00	14,891,193,418.00	19,463,301,121.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Laporan		1			200,000,000.00	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	3	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA /TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Ton		266.45				0	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	4		Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		kelompok		7	7	282,996,950.00	280,000,000.00	280,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup

2	11	11	2.01	5		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		Dokumen		1	1	1,000,000,000.00	14,511,193,418.00	0 19,083,301,121.0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	20		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota ata TPA/TPST regional		TON			266.45	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 bagi seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA